



LAPORAN

**MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
dan SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**



**TRIWULAN IV
TAHUN 2025**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Monitoring, Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta periode Triwulan IV Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas dalam penyelenggaraan layanan. Survei SPKP dan SPAK menjadi instrumen penting dalam mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja dan integritas unit pelayanan, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan tindak lanjut yang tepat sasaran.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan survei dan penyusunan laporan ini. Kami juga terbuka terhadap berbagai masukan yang membangun guna menyempurnakan laporan ini ke depannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan integritas di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 9 Januari 2025

Ketua,



Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.

A. Latar Belakang

Laporan monitoring dan evaluasi hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). SPKP bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan publik dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, sedangkan SPAK difokuskan pada penilaian masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di lingkungan instansi pemerintah.

Kedua survei ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas kinerja organisasi pemerintah, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta integritas penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil survei tidak hanya berfungsi sebagai gambaran tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan integritas aparatur.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan hasil survei benar-benar ditindaklanjuti. Tindak lanjut ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan dari SPKP dan SPAK tidak berhenti pada tahap pengukuran semata, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan.

B. Tujuan/Manfaat

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan, kemajuan, dan kendala yang dihadapi atas proses pengelolaan survei SPKP dan SPAK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
2. Untuk menjadi bahan masukan dalam menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan pengelolaan survei SPKP dan SPAK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

C. Ruang Lingkup Monitoring

Sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunannya survei kepuasan masyarakat yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

D. Pelaksanaan Monitoring Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Pelaksanaan monitoring pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilaksanakan oleh Kepaniteraan Muda Hukum bersama unsur pimpinan. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan setiap triwulan. Hasil monitoring dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul serta menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan langkah solusi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan survei kepuasan masyarakat.

Hasil monitoring yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai instrumen penting dalam mengidentifikasi berbagai kendala atau permasalahan yang timbul selama proses pengelolaan survei. Selain itu, temuan dari kegiatan monitoring juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan strategis, serta menetapkan langkah-langkah solutif yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, kegiatan monitoring ini memiliki peran yang signifikan dalam mendorong efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan survei, sehingga tujuan utama peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat tercapai secara optimal.

E. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Mekanisme pelaksanaan monitoring Pengelolaan SPKP dan SPAK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
https://drive.google.com/file/d/1_gQ9_K_mQ5bnvzPlmyr6fNBbsfn5Q7KQ/view?usp=drive_link,
https://drive.google.com/file/d/13M2wKIfOJH7jNzK6AZZ_J2tqvuyjSygE/view?usp=drive_link
2. Memantau langsung kegiatan pengelolaan survei kepuasan masyarakat di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

F. Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut berdasar survei SPKP dan SPAK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta baik melalui kehadiran secara langsung ataupun melalui website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (*online*):

No	Triwulan/Tahun	Saran Responden	Tindak Lanjut	Keterangan
	Triwulan IV/2025	nihil	nihil	

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Bahwa setiap perubahan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sangat efektif dan dapat meningkatkan layanan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Bahwa terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dari bulan Oktober - Desember tahun 2025 menunjukan bahwa SPKP mayoritas memiliki Indeks rata rata 98,63. Dan SPAK 99,37 atau masuk pada kategori A (Sangat Baik).

Bahwa survei masyarakat sangat diperlukan untuk kontroling, perbaikan dan peningkatan terhadap peningkatan layanan masyarakat atau pengawasan

dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Rekomendasi:

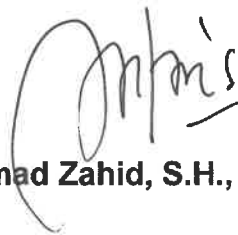
- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk tetap menjaga integritasnya dan pelayanan yang sudah baik untuk tetap di pertahankan dan lebih baik lagi;
- b. Survei untuk tetap dilaksanakan secara elektronik dan manual;
- c. Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjutnya untuk secara berkala tetap dilaksanakan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan kepada Pegawai dan Petugas layanan meja PTSP untuk dilakukan secara rutin.
- e. Menetapkan Responden yang Prima untuk survey;

Demikian laporan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), agar dapat jadi bahan perbaikan di masa akan datang.

Yogyakarta, 9 Januari 2025

✍ **Panitera,**

Panitera Muda Hukum,



Mohammad Zahid, S.H., M.H.



Tri Asih Wahyudiati, S.H., M.Kn.

Mengetahui:

Ketua,



Dr. Nelwy Christin, S.H. M.H.

LAMPIRAN

Notula Rapat Monev beserta lampirannya



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Nomor 41/PAN/UND.OT1.2/I/2026
Hari : Jumat
Tanggal : 9 Januari 2026
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Persiapan
Acara : Rapat Monev SPKP dan SPAK
Peserta Rapat : 1. Ketua PTUN Yogyakarta
2. Wakil Ketua PTUN Yogyakarta
3. Hawasbid Kepaniteraan Muda Hukum
4. Panitera Muda Hukum
5. Pelaksana Kepaniteraan Muda Hukum

Jalannya Rapat :

Rapat Monev SPKP dan SPAK dibuka oleh Retno Nawangsih, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua. Adapun inti dari Rapat Monev SPKP dan SPAK ini adalah:

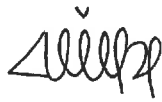
- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan integritas aparatur.
- b. Ibu Tri Asih menyampaikan bahwa pada Triwulan IV tidak ditemukan kekurangan jumlah responden dalam pelaksanaan survei SPKP dan SPAK. Seluruh target responden telah terpenuhi sesuai ketentuan.
- c. Wakil Ketua menanyakan apakah selama pelaksanaan survei terdapat keluhan dari responden. Menanggapi hal tersebut, Ibu Tri Asih menjelaskan bahwa tidak terdapat keluhan sama sekali dari responden pada periode survei tersebut.
- d. Ketua menekankan pentingnya pemetaan hasil survei secara lebih mendalam untuk ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Ketua mengarahkan agar dicermati nilai-nilai terendah dalam hasil survei guna menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas layanan.
- e. Lebih lanjut, Ketua menyampaikan bahwa nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN harus terus ditingkatkan dan dijaga. Selain itu, perlu diperhatikan pengaduan terkait keterbukaan informasi serta diidentifikasi kebutuhan pelatihan, baik yang dapat dilaksanakan secara internal maupun dengan menghadirkan narasumber dari luar untuk kegiatan sosialisasi.

- f. Ibu Tri Asih mengusulkan perlunya pelatihan terkait gratifikasi bagi aparatur. Menanggapi hal tersebut, Ketua menjelaskan bahwa pelatihan gratifikasi telah tersedia melalui Bawas dan tinggal membuka slot pelatihan yang tersedia.
- g. Wakil Ketua menambahkan bahwa proses kelulusan dalam pelatihan per sesi tidak sulit karena dapat diulang beberapa kali hingga memperoleh nilai tertinggi.

Demikian Hasil Rapat Monev SPKP dan SPAK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang dapat kami sampaikan. Rapat ditutup pada pukul 14.33 WIB oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 Januari 2026

Notulis



Nanda Padma

Mengetahui,
PLT Panitera



Tri Asih Wahyudiati

LAMPIRAN





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor : 41 /PAN/UND.OT1.2/I/2026
Sifat : Biasa
Hal : Rapat Monev SPKP, SPAK, Layanan Informasi Publik,
dan SEPPIA

Yogyakarta, 7 Januari 2026

Yth. Para Pejabat pada daftar terlampir.
di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu Rapat Monev Kepaniteraan Muda Hukum dengan
jadwal sebagai berikut:

pada hari, tanggal : Jumat, 9 Januari 2026
waktu : 14.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Persiapan
acara : Rapat Monev SPKP, SPAK, Layanan Informasi Publik,
dan SEPPIA

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Panitera

Mohammad Zahid

LAMPIRAN I

Surat Undangan Panitia

Nomor : 41 /PAN/UND.OT1.2/I/2026

Tanggal : 7 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI UNDANGAN

1. Ketua PTUN Yogyakarta
2. Wakil Ketua PTUN Yogyakarta
3. Hawasbid Kepaniteraan Muda Hukum
4. Panitia Muda Hukum
5. Pelaksana Kepaniteraan Muda Hukum
6. Notulis : Nanda Padma Parahita,S.H

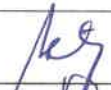
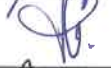
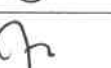
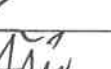
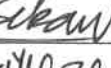


**DAFTAR HADIR RAPAT MONEV SPKP, SPAK,
LAYANAN INFORMASI PUBLIK, DAN SEPPIA**

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

JUMAT, 9 JANUARI 2026, PUKUL 14.00 WIB S.D SELESAI

DI RUANG SIDANG PERSIAPAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nelly Christi	Ketua	
2	Petno Nawangsih	Waka	
3	Nieke Zulfaharum	Hawasbig	
4	Toti Anah MA	Pamerc Ktula	
5	R. Rina. M	ARSIPARIS	
6	Andrie Wibowo	PP	
7	Budi Suryana	PP	
8	Rahmat S	PP	
9	Rizkiyas Sekar H.	APP	
10	Nanda Padma	APP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			